

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN,
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CHECKLIST TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Provinsi :
 Jumlah Pemilih (DPT) :
 Jumlah TPS :

Checklist Perencanaan Perlengkapan Pemungutan Suara di Tingkat Bawaslu

Nama Pengawas :
 Tanggal :
 Jam :

NO.	Pertanyaan	Jawaban		Rujukan Peraturan Perundang-undangan	Keterangan
		Ya	Tidak		
Jadwal Kegiatan Perlengkapan Pemungutan Suara					
1.	Apakah KPU telah menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU telah menetapkan jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?				

3.	Apakah jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan KPU sudah sesuai dengan jadwal tahapan?				
4.	Apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dapat diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?				
Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara					
1.	Apakah KPU sudah menentukan jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan untuk penyelenggaraan Pemilu?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap jenis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilu sebelumnya?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
3.	Apakah KPU pernah melakukan evaluasi terhadap desain atau format formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
Jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara					
1.	Apakah KPU sudah menentukan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara untuk Pemilu 2014?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah melakukan inventarisasi jumlah perlengkapan			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	

	pemungutan suara Pemilu sebelumnya yang masih dapat digunakan??				
Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara					
1.	Apakah KPU sudah membuat spesifikasi teknis dari perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilu sebelumnya?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
Sosialisasi/Diseminasi					
1.	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi/diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten /kota?			Pasal 8 ayat (1) huruf p UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi atau mengumumkan kepada masyarakat tentang prosedur dan mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf p UU No.15 Tahun 2011	
Sistem Informasi Perlengkapan Pemungutan Suara (Silog)					
1.	Apakah perangkat Silog sudah tersedia?				
2.	Apakah KPU sudah membuat panduan pengoperasian Silog?				
3.	Apakah SILOG merupakan sistem informasi Perlengkapan pemungutan suara yang harus				

	dioperasikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?				
4.	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara apabila SILOG mengalami kerusakan/gangguan atau tidak mampu dioperasikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?				
5.	Apakah dalam proses penggunaan SILOG pada saat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara KPU bekerjasama dengan pihak rekanan?				
Pemilu Ulang atau Pemilu Susulan					
1.	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara jika terjadi Pemilu tunda atau Pemilu ulang dikarenakan suatu hal?				
2.	Jika sudah, apakah KPU sudah mensosialisasikan prosedur tersebut kepada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah?				
Koordinasi dan Kerjasama					
1.	Apakah dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara KPU melakukan pengamanan?			Pasal 39 PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah dalam pengamanan tersebut, KPU bekerjasama				

	dengan TNI/Polri?				
3.	Apakah kerjasama KPU dengan TNI/Polri diatur dengan ketentuan khusus (MoU/Akta Kesepakatan)?				
4.	Selain dengan TNI/Polri, apakah KPU melakukan kerjasama pengamanan dengan pihak lain?				
5.	Apakah kerjasama KPU dengan pihak lain dalam hal pengamanan terhadap perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan kontrak kerjasama?				
6.	Apakah seluruh biaya pengamanan tersebut ditanggung oleh KPU?				
Akses Data dan Informasi					
1.	Apakah KPU memperbolehkan Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat datang meminta data atau informasi kepada KPU terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara ?				
2.	Apakah KPU memberikan data atau informasi yang diminta oleh Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat, terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara ?				

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN,
 PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CHECKLIST TATA CARA PENGAWASAN PENGADAAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Jumlah Pemilih (DPT) :

Jumlah TPS :

Checklist Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara di Tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota

Nama Pengawas :

Tanggal :

Jam :

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
KOTAK SUARA					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia?			Pasal 4 huruf d PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	a. Apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah			Pasal 14 ayat (1) PKPU	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	ditentukan, yaitu 4 (empat) kotak suara tiap TPS?			No.16 Tahun 2013	
	b. Jika kotak suara tidak diproduksi sejumlah 4 (empat) kotak dikalikan jumlah TPS, maka berapa jumlah yang diproduksi?				
	c. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan, yaitu 3 (tiga) kotak suara tiap TPS?			Pasal 14 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Jika kotak suara tidak diproduksi sejumlah 3 (tiga) kotak dikalikan jumlah TPS, maka berapa jumlah yang diproduksi?				
	e. Khusus untuk Pemilu Luar Negeri, apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan, yaitu 1 (satu) kotak suara tiap TPS?			Pasal 14 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	f. Jika jumlah kotak suara untuk Pemilu di Luar Negeri tidak sejumlah TPS yang telah ditentukan, berapa jumlah kotak suara yang diproduksi?				
	g. Apakah spesifikasi kotak suara yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Pasal 15 PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Apakah KPU melakukan				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	monitoring terhadap perkembangan pengadaan kotak suara secara periodik?				
4.	Apakah kotak suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima kotak suara yang diproduksi oleh perusahaan pengadaan kotak suara dalam keadaan baik?				
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima kotak suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
SURAT SUARA					
1.	Apakah surat suara sudah tersedia?			Pasal 4 huruf a PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	a. Apakah surat suara yang dicetak terdiri atas 4 (empat) jenis: - Surat suara untuk Pemilu DPR; - Surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; - Surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; dan - Surat suara untuk Pemilu DPD ?			Pasal 7 ayat (1) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, apakah surat suara yang dicetak terdiri atas: - Surat suara untuk				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	Pemilu DPR; - Surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; dan - Surat suara untuk Pemilu DPD ?				
3.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPR terdiri atas 77 (tujuh puluh tujuh) surat suara, sesuai jumlah Dapil anggota DPR?			Pasal 7 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPD terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) surat suara, sesuai jumlah provinsi?			Pasal 7 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
5.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas 259 (dua ratus lima puluh sembilan) surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil anggota DPRD Provinsi?			Pasal 7 ayat (4) PKPU No.16 Tahun 2013	
6.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, termasuk untuk Pemilu anggota DPRA, DPR Papua, dan DPR Papua Barat?			Pasal 7 ayat (6) PKPU No.16 Tahun 2013	
7.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas 2.102 (dua ribu seratus dua) surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota ?			Pasal 7 ayat (5) PKPU No.16 Tahun 2013	
8.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, termasuk untuk Pemilu Anggota			Pasal 7 ayat (7) PKPU No.16 Tahun 2013	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	DPRK, serta DPRD Kabupaten/Kota Papua dan Papua Barat?				
9.	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2% dari jumlah DPT tersebut sebagai cadangan?			Pasal 34 PKPU No.16 Tahun 2013	
10.	a. Apakah mekanisme pengamanan surat suara yang ditetapkan oleh KPU diterapkan selama proses pencetakan surat suara sampai penyerahannya kepada KPU Kabupaten / Kota?			Pasal 39 PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah ada petugas dari KPU yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?			Pasal 39 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	c. Apakah ada aparat kepolisian yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?			Pasal 39 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah ada pengawalan dari aparat keamanan terhadap surat suara yang selesai dicetak yang dikirim oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
	e. Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman surat suara oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
11.	a. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat			Pasal 39 ayat	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak?			(3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai diverifikasi?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	c. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dikirim ke KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah KPU dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	e. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah dicetak yang masih tersimpan di percetakan/gudang?				
	f. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah diverifikasi yang masih tersimpan di percetakan/gudang?				
	g. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang dikirim ke KPU Kabupaten/Kota, tetapi masih tersimpan di percetakan/gudang?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
12.	Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?				
13.	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
14.	Apakah KPU mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara?			Pasal 39 ayat (4) PKPU No.16 Tahun 2013	
15.	Apakah surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan telah diverifikasi dan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari partai politik terkait gambar, nama, dan nomor partai politik, serta foto, nomor urut, dan nama calon tetap partai politik atau calon DPD?			Pasal 6 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
16.	a. Apakah pihak percetakan juga mencetak surat suara dengan diberikan tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang untuk setiap daerah pemilihan?			Pasal 34 ayat (4) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah KPU telah menyediakan tempat penyimpanan untuk surat suara pemungutan suara ulang?				
17.	a. Apakah terdapat surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	b. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara terkait surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?				
	c. Apakah terdapat kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?			Pasal 39 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara terkait kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?				
	e. Apakah KPU dan pihak percetakan melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?				
	f. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang pemusnahan surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?				
18.	a. Apakah KPU Kabupaten /Kota telah menerima surat suara dari pihak percetakan dalam kondisi baik?				
	b. Apakah KPU Kabupaten /Kota telah menerima surat suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
	c. Apakah surat suara yang diterima KPU Kabupaten /Kota dari perusahaan percetakan dalam kondisi di pak di kantong plasting untuk setiap 1.000 (seribu) lembar surat suara?			Pasal 35 ayat (1) PKPU No.16 Tahun 2013	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
19.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan surat suara secara periodik?				
20.	Apakah surat suara dicetak oleh pihak percetakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
TINTA					
1.	Apakah tinta sudah tersedia?			Pasal 4 huruf b PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah: a. Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml?			Pasal 11 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah tinta tersebut tahan tumpah (<i>leakproof</i>)?			Pasal 11 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	c. Apakah tinta mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			Pasal 10 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah tinta yang diproduksi memiliki kualitas daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian baik menggunakan sabun, detergen, alkohol, maupun pembersih lainnya?			Pasal 10 ayat (5) PKPU No.16 Tahun 2013	
	e. Apakah tinta yang diproduksi telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?			Pasal 10 ayat (6) PKPU No.16 Tahun	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
				2013	
	f. Apakah tinta tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS?			Pasal 12 PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Apakah KPU menempatkan petugasnya dalam pengamanan terhadap proses pengadaan tinta?			Pasal 41 PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah perusahaan pengadaan tinta menjaga kualitas tinta yang diproduksi?			Pasal 41 PKPU No.16 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan tinta secara periodik?			Pasal 41 PKPU No.16 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman surat suara oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
7.	Apakah tinta diproduksi oleh perusahaan pengadaan tinta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?				
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima tinta dari perusahaan dalam keadaan baik?				
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima tinta sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
BILIK PEMUNGUTAN SUARA					

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
1.	Apakah bilik pemungutan suara sudah tersedia?			Pasal 4 huruf e PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 4 (empat) bilik tiap TPS?			Pasal 18 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Jika bilik tidak diproduksi sejumlah 4 (empat) bilik dikalikan jumlah TPS, maka berapa jumlah yang diproduksi?				
	c. Apakah bilik pemungutan suara dibuat dari bahan karton <i>double wall</i> ?			Pasal 18 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan bilik pemungutan suara secara periodik?				
4.	Apakah bilik pemungutan suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima bilik pemungutan suara dari perusahaan dalam keadaan baik?				
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima bilik pemungutan suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
SEGEL					

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
1.	Apakah segel sudah tersedia?			Pasal 13 PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlah segel sesuai dengan yang ditetapkan KPU, yaitu 26 (dua puluh enam) segel per TPS ?				
	b. Apakah spesifikasi segel yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan KPU?				
3.	Apakah KPU menempatkan petugasnya dalam pengamanan terhadap proses pengadaan segel?			Pasal 40 PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan segel secara periodik?			Pasal 40 PKPU No.16 Tahun 2013	
5.	Apakah perusahaan pengadaan segel menjaga kualitas segel yang diproduksi?			Pasal 40 PKPU No.16 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman segel oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
7.	Apakah segel diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima segel dari perusahaan dalam keadaan baik?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima segel sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN					
1.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan, meliputi: bantalan, paku dan meja, sudah tersedia?			Pasal 4 huruf f PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diadakan berjumlah 1 (satu) buah ber bilik pemungutan suara di TPS ?			Pasal 21 ayat (2) PerKPU Nomor 16 Tahun 2013	
3.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diproduksi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU?				
4.	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pengadaan alat untuk mencoblos pilihan secara periodik?				
5.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat untuk mencoblos pilihan dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	menerima alat untuk mencoblos pilihan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA					
FORMULIR					
1.	<p>a. Apakah formulir berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir C dengan diberi pengaman yang digunakan oleh KPPS; - Formulir C-LN dengan diberi pengaman yang digunakan oleh KPPSLN; - Formulir D yang digunakan oleh PPS; - Formulir DA yang digunakan oleh PPK; - Formulir D-LN yang digunakan oleh PPLN; - Formulir DB dan EB yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota; - Formulir Model DC, EA dan EC yang digunakan oleh KPU Provinsi; - Formulir Model DD, E dan ED yang digunakan oleh KPU; <p>telah tersedia?</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 huruf b PKPU Nomor 16 Tahun 2013; - Keputusan KPU No. 765/Kpts/KPU/TAHUN 2013; - Keputusan KPU No. 928/Kpts/KPU/TAHUN 2013 	
	b. Kalau sudah, apakah formulir tersebut memenuhi kualifikasi teknis yang ditetapkan KPU?				
2.	Apakah formulir sebagaimana dimaksud pada pertanyaan angka 1 huruf a dicetak sesuai dengan jumlah yang				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	ditetapkan?				
3.	a. Apakah formulir Lampiran Berita Acara tersebut sudah tersedia?			Pasal 25 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
	b. Kalau sudah, apakah formulir lampiran tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 25 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan formulir secara periodik?				
5.	Apakah formulir tersebut diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima formulir dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima formulir sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
SAMPUL KERTAS					
1.	Apakah sampul kertas sudah tersedia?			Pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah, apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan jenis yang ditetapkan oleh KPU?			Pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
3.	Apakah sampul kertas			Pasal 23	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	dicetak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU?			PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
4.	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU?			Pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan sampul kertas secara periodik?				
6.	Apakah sampul kertas dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima sampul kertas dari perusahaan dalam keadaan baik?				
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima sampul kertas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
STIKER NOMOR KOTAK SUARA					
1.	Apakah stiker nomor kotak suara telah tersedia?			Pasal 26 PKPU No.16 tahun 2013	
2.	Kalau sudah, apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan KPU?				
3.	Apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jumlah yang telah				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	ditetapkan KPU?				
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan stiker nomor kotak suara secara periodik?				
5.	Apakah stiker nomor kotak suara dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima stiker nomor kotak suara dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima stiker nomor kotak suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
ALAT BANTU TUNA NETRA					
1.	Apakah alat bantu tuna netra telah tersedia?			Pasal 5 huruf e PKPU No.16 tahun 2013	
2.	Apakah alat bantu tuna netra yang diproduksi untuk Pemilu anggota DPD?			Pasal 28 PKPU No.16 tahun 2013	
3.	Apakah alat bantu tuna netra yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan KPU berdasarkan jumlah pemilih tuna netra yang terdaftar dalam DPT?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses produksi alat bantu tuna				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	netra secara periodik?				
5.	Apakah alat bantu tuna netra dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat bantu tuna netra dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat bantu tuna netra sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
	DAFTAR CALON TETAP				
1.	Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah tersedia?			Pasal 5 huruf f PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicetak sebanyak 1 (satu) set DCT untuk setiap Daerah Pemilihan sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditentukan?			Pasal 30 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Untuk TPS-LN dan PPLN apakah KPU telah mencetak DCT Anggota DPR Dapil Jakarta II sesuai dengan TPS yang telah ditentukan KPU?			Pasal 31 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan DCT secara periodik?				
5.	Apakah DCT dicetak oleh			Lampiran	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima DCT dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima DCT sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
	PERLENGKAPAN TPS/TPSLN				
1.	Apakah alat kelengkapan lain (tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, lem/perekat, karet pengikat surat suara, spidol, kantong plastik, gembok, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan pulpen) sudah tersedia?			Pasal 29 PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah, apakah semua alat kelengkapan tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?				
3.	Apakah daftar pemilih tetap (DPT) untuk tiap TPS dicetak sebanyak 16 (enam belas) rangkap sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan?				
4.	a. Apakah tanda pengenal anggota KPPS/KPPSLN				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	untuk setiap TPS dicetak sebanyak 7 (tujuh) orang dikalikan jumlah TPS yang telah ditetapkan?				
	b. Apakah tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN dicetak sebanyak 2 (dua) orang dikalikan jumlah TPS?				
	c. Apakah tanda pengenal saksi partai politik peserta Pemilu untuk setiap TPS dicetak sebanyak 12 (dua belas) buah sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan?				
	d. Apakah tanda pengenal saksi calon DPD peserta Pemilu untuk setiap TPS dicetak sebanyak jumlah calon DPD peserta Pemilu sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan di masing-masing provinsi?				
5.	Apakah surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS?				
6.	Apakah KPU menyediakan panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN termasuk naskah sumpah/janji KPPS/KPPSLN sebanyak jumlah TPS yang ditetapkan KPU?				
7.	Apakah KPU				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	menyediakan gembok dan anak kunci sebanyak 4 (empat) buah sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan?				
8.	Apakah KPU menyediakan gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah sebanyak jumlah TPS-LN yang ditetapkan?				

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN,
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CHECKLIST TATA CARA PENGAWASAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Jumlah Pemilih (DPT) :

Jumlah TPS :

Checklist Pendistribusian Perengkapan Pemungutan Suara di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri

Nama Pengawas :

Tanggal :

Jam :

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
SORTIR SURAT SUARA					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses sortir terhadap surat suara yang telah diterima dari perusahaan dengan				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	menempatkan aparat keamanan ?				
2	Apakah KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugasnya dalam proses sortir surat suara?				
3.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir surat suara di kantor sekretariat KPU Kabupaten/Kota?				
4.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir surat suara di ruangan khusus?				
5.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses sortir surat suara?				
6.	Apakah pada saat sortir surat suara KPU Kabupaten/Kota masih menemukan surat suara yang rusak?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara terkait surat suara rusak pada saat sortir?				
8.	Dalam hal ditemukan surat suara rusak, apakah KPU Kabupaten/Kota sudah meminta perusahaan pencetak surat suara untuk segera mengirimkan surat suara yang baru sebagai				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	pengganti dengan jumlah yang sama dengan surat suara yang rusak?				
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah menerima kembali surat suara yang baru sebagai pengganti surat suara yang rusak dalam jumlah yang sama?				
10.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak dari perusahaan pencetak surat suara?				
11.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak yang ditemukan pada saat sortir?				
12.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara pemusnahan surat suara yang rusak?				
13.	Apakah berita acara pemusnahan surat suara yang rusak juga ditandatangani oleh Pengawas Pemilu?				
14.	Apakah terhadap surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir untuk memastikan tidak ada lagi surat suara rusak?				
15.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	terhadap perkembangan sortir surat suara secara periodik?				
16.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?				
PELIPATAN SURAT SUARA					
1.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan surat suara sesuai dengan teknik pelipatan surat suara yang diatur oleh KPU?			Pasal 8 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pengamanan terhadap proses pelipatan surat suara?				
3.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menempatkan petugasnya dalam pengamanan proses pelipatan surat suara?				
4.	Apakah dalam proses pelipatan surat suara terdapat kejadian yang menyebabkan surat suara menjadi rusak?				
5.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan pelipatan surat suara secara periodik?				
6.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
PENYUSUNAN ALOKASI					
1.	<p>Apakah KPU Kabupaten/ Kota menyusun alokasi perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiap TPS mendapat alokasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) 4 (empat) kotak suara 2) 4 (empat) gembok bersama kuncinya 3) 4 (empat) bilik pemungutan suara - Salah 1 (satu) kotak suara dari tiap TPS berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan 2) Tinta 2 (dua) botol 3) 4 (empat) set alat untuk memberikan pilihan 4) 1 (satu) set DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota 5) 7 (tujuh) tanda pengenal anggota KPPS 6) 12 (dua belas) tanda pengenal saksi partai politik peserta pemilu 7) Untuk Provinsi Aceh, 12 (dua belas) tanda pengenal saksi partai politik peserta pemilu, ditambah dengan 3 (tiga) tanda pengenal saksi partai politik lokal peserta pemilu 2014 8) Tanda pengenal saksi calon DPD sebanyak jumlah calon DPD dari masing-masing provinsi 9) 2 (dua) tanda pengenal petugas keamanan TPS 				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	10) 16 (enam belas) rangkap salinan DPT sebanyak jumlah TPS masing-masing 11) Untuk Provinsi Aceh, 19 (sembilan belas) rangkap salinan DPT sebanyak jumlah TPS masing-masing 12) Segel 13) Sampul kertas 14) 1 (satu) set formulir pemungutan dan penghitungan suara 15) Lem/perekat 16) Tali pengikat 17) kantong plastik 18) spidol 19) pulpen				
2	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan penyusunan alokasi perlengkapan pemungutan suara secara periodik?				
DISTRIBUSI KE PPK					
1	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan distribusi perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			Pasal 36 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2	Apakah PPK sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/ Kota dalam keadaan baik?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	Apakah PPK paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota?				
3	Apakah PPK menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
4	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPK?				
5	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke PPK?				
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?			Pasal 38 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?				
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pendistribusian kotak suara				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?				
DISTRIBUSI KE PPS					
1	Apakah PPK melakukan distribusi kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			Pasal 36 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah PPS sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK dalam keadaan baik?				
3.	Apakah PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK?				
3	Apakah PPS menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
4	Apakah PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPS?				
5	Apakah PPK melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke PPS?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
6	Apakah PPK melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?				
7	Apakah PPK melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?				
8	Apakah PPK melakukan pendistribusian kotak suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?				
DISTRIBUSI KE KPPS					
1.	Apakah PPS melakukan distribusi kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			Pasal 36 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah KPPS sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS dalam keadaan baik?				
2	Apakah KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS?				
3	Apakah KPPS menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
4	Apakah PPS membuat berita acara penerimaan				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada KPPS?				
5	Apakah PPS melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke KPPS?				
6	Apakah PPS melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?				
7	Apakah PPS melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?				

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD